

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kepada publik. Perhatian semakin besar terhadap praktek akuntansi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat agar dikelola secara akuntabel dan transparan. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997 (Kurniawati, 2016).

Di era sekarang, masyarakat Indonesia menuntut agar pemerintah mampu mengelola pemerintahan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Agar tercipta akuntabilitas, pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi laporan keuangan daerah yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik tanpa harus ada yang ditutupi atau biasa disebut dengan transparansi.

Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksesibilitas laporan keuangan yang diberikan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat melakukan pengawasan dengan lebih leluasa dan hasil *feedback* atas kemudahan akses tersebut bisa menjadi bahan koreksi atau masukan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik lagi. Aksesibilitas ini dapat diberikan melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website.

Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pendapat tersebut telah dibuktikan juga oleh Sande (2013). Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Azizah (2014) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Menurut Rohman (2009), aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar. Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Penyajian informasi aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain,

laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Somad, 2016).

Menurut Aliyah dan Nahar (2012), aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan daerah dan pendapat tersebut sesuai dengan Mulyana (2006), Sagala (2011), Kurniawati (2016), Sari (2017). Sedangkan penelitian Azizah (2014) menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi namun tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah daerah. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer”. Kurniawati (2016) dan Handri, Rifa dan Rahmawati (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aliyah dan Nahar (2012) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara” dengan menambahkan variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah yang diambil dari penelitian Superdi (2017) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung”. Selain itu, perbedaan penelitian ini terletak pada obyek yang diteliti, karena penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Madiun.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Madiun?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Madiun?

3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Madiun.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Madiun.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah bagi

pengguna dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai studi komparatif bagi peneliti yang mendalami masalah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang akan dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian, definisi penelitian dan pengukuran

operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.